

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
INTISARI	xii
ABSTRACT	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	30
C. Tujuan Penelitian	30
D. Manfaat Penelitian	31
E. Keaslian Penelitian	31
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
1. Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	36
2. Prinsip Adil/Tidak Diskriminatif	38
3. Prinsip Bersaing	45

B. Kelembagaan Internasional terkait LRIT

1. *International Maritime Organization (IMO)*..... 50
2. *International Mobile Satellite Organization (IMSO)*... 54

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian..... 57
- B. Penelitian Kepustakaan
 1. Jenis Data 58
 2. Tipe Data..... 59
 3. Bahan Hukum..... 59
- C. Penelitian Lapangan
 1. Lokasi Penelitian 61
 2. Subjek Penelitian..... 62
 3. Objek Penelitian 62
 4. Alat Pengumpulan Data 63
- D. Analisis Data..... 63
- E. Jalannya Penelitian..... 64

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pertimbangan Tim Teknis Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Memasukkan Persyaratan dalam Dokumen Penawaran Teknis bahwa Penyedia Selain *Recognized* ASP LRIT Indonesia Harus Mendapat Dukungan dari *Recognized* ASP LRIT Indonesia 66

B. Kesesuaian Syarat Khusus yang dibuat oleh PPK dalam Dokumen Penawaran Teknis Pengadaan Langganan <i>Airtime</i> LRIT dengan Regulasi dan Mekanisme yang Harus Dilakukan PPK agar Pengadaan Langganan <i>Airtime</i> LRIT Sesuai dengan Ketentuan dan Regulasi yang Berlaku di Indonesia	
1. Kesesuaian Syarat Khusus yang dibuat oleh PPK dalam Dokumen Penawaran Teknis Pengadaan Langganan <i>Airtime</i> LRIT dengan Regulasi.....	73
a. Posisi dan Kedudukan <i>Long Range Identification and Tracking of Ships (LRIT)</i> sebagai Barang/Jasa Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	73
b. Posisi dan Kedudukan <i>Recognized Application Service Provider (Recognized ASP)</i> dan <i>Authorized testing Application Service Provide (Authorized ASP)</i>	83
c. Tender Pengadaan Barang/Jasa Langganan <i>Airtime</i> LRIT	88
2. Mekanisme yang Harus Dilakukan PPK agar Pengadaan Langganan <i>Airtime</i> LRIT Sesuai dengan Ketentuan dan Regulasi yang Berlaku di Indonesia	94

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 100

B. Saran 102

DAFTAR PUSTAKA xiv